

BUKU PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LHOKSEUMAWE**

KEMENTERIAN AGAMA
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR: 194.a TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEBADIAN KEPADA
MASYARAKAT IAIN LHOKSEUMAWE
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2017
REKTOR IAIN LHOKSEUMAWE

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penerapan Buku Pedoman Pengelolaan Pebabdian Kepada Masyarakat IAIN Lhokseumawe di Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, perlu pemberlakuan Buku Pedoman Pengelolaan Pebabdian Kepada Masyarakat di IAIN Lhokseumawe;

b. bahwa untuk terlaksananya penerapan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

8. PMK No.S-39/MK.02/2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Honorarium Dosen/Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu, Honorarium Penyelenggara Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan, dan Lain-lain pada Satker PTKN di Lingkungan Kemenag;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Departemen Agama;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang ORTAKER IAIN Lhokseumawe;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2016 tentang STATUTA IAIN Lhokseumawe.

Memperhatikan.....ha

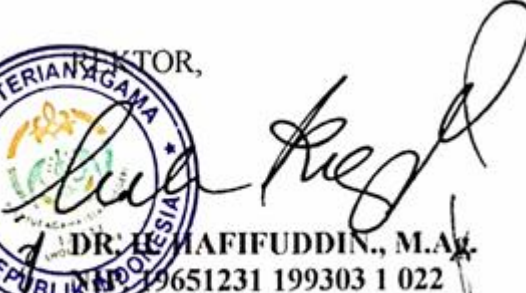
Memperhatikan: Fungsi Buku Pedoman Pengelolaan Pebabdian Kepada Masyarakat IAIN Lhokseumawe di Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MSYARAKAT IAIN LHOKSEUMAWE DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2017;
- Pertama** : Surat keputusan ini merupakan surat resmi Pemberlakuan Buku Pedoman Pengelolaan Pebabdian Kepada Masyarakat IAIN Lhokseumawe di Lingkungan IAIN Lhokseumawe
- Kedua** : Segala Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan ke dalam Anggaran DIPA IAIN Lhokseumawe tahun 2017
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 24 Maret 2017

REKTOR,
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
DR. H. MAFIFUDDIN., M.A.
19651231 199303 1 022



PENGANTAR KETUA LPPM IAIN LHOKSEUMAWE

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang rahmat-Nya meliputi seluruh ikhtiar tim penyusun Buku Panduan Penelitian ini, sehingga terselesaikan dengan baik.

Buku Panduan ini menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan Pebabdian Kepada Masyarakat dan penerbitan bagi dosen IAIN Lhokseumawe. Dengan penerbitan Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program- program yang dikeluarkan oleh LPPM agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul dan pengelola penelitian dan penerbitan di IAIN Lhokseumawe.

Kami berharap, panduan ini tersosialisasikan kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program Pebabdian Kepada Masyarakat IAIN Lhokseumawe. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas prosedur teknis berkenaan dengan pelaksanaan Pebabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen di lingkungan IAIN Lhokseumawe pada tahun 2017. Selain itu, buku panduan ini secara khusus dimaksudkan untuk memperjelas prosedur teknis pengajuan, seleksi, dan pelaporan Pebabdian Kepada Masyarakat.

Akhirnya, atas nama Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun dan semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku panduan Pebabdian Kepada Masyarakat ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Lhokseumawe, Februari 2017
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
IAIN Lhokseumawe

Sofyan Ariato, M.Pd
NIP. 197405032005011004

SAMBUTAN REKTOR IAIN LHOKSEUMAWE

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT dengan telah selesainya penyusunan buku Panduan Penyelenggaraan Penelitian IAIN Lhokseumawe. Tersusunnya panduan ini merupakan hasil dedikasi dan kerja keras yang sungguh-sungguh dari tim penyusun, disertai kesadaran dari kita semua betapa pentingnya kegiatan penelitian di lingkungan universitas bagi peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan umat manusia.

Dalam perjalanannya IAIN Lhokseumawe terus melakukan pembaruan, melakukan perubahan yang disesuaikan dengan tantangan sekaligus tuntutan perkembangan jaman, baik dalam skala nasional maupun internasional, dalam konteks dinamika kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam era peradaban globalisasi yang demikian dinamis, cepat serta demikian kompetitif. Dalam denyut nadi kehidupan sivitas akademi universitas yang penuh dinamika tersebut, IAIN Lhokseumawe tetap mempertahankan karakternya sebagai yang peduli dengan perkembangan keilmuan yang Islami.

Dalam upaya untuk melahirkan sarjana yang berkarakter, berjiwa kepeloporan dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia yang beradab dan sejahtera, yang memiliki intelektualitas dan moralitas tinggi serta memiliki visi modern dan jauh ke depan, maka diperlukan suatu sinergi yang kokoh antara pengembangan pendidikan dengan kegiatan dan pengembangan penelitian.

Kegiatan dan pengembangan penelitian yang handal di satu perguruan tinggi hanya dimungkinkan bila perguruan tinggi tersebut memiliki kemampuan pengorganisasian bidang penelitian yang handal. Oleh karena itu, hadirnya buku Panduan Penyelenggaraan Penelitian IAIN Lhokseumawe merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di IAIN Lhokseumawe, agar para peneliti (dosen) dengan segala potensi dan latar belakang keilmuannya dapat mempersembahkan hasil penelitian yang inovatif, unik, serta memberikan kemanfaatan yang berarti bagi umat manusia.

Selaku Rektor kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim penyusun, semoga hadirnya buku Panduan Penyelenggaraan Penelitian IAIN Lhokseumawe ini dapat dimanfaatkan untuk memajukan kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Lhokseumawe.

Assalamualaikum wr. wb.

Lhokseumawe, Februari 2017
Rektor IAIN Lhokseumawe

REKTOR,

DR. H. MAFIFUDDIN., M.Ag.
19651231 199303 1 022

DAFTAR ISI

SUARAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN
 PENGANTAR LPPM
 SAMBUTAN REKTOR

BAB I	:PENDAHULUAN	
	A. Konteks Program.....	1
	B. Tujuan.....	3
	C. Landasan Hukum.....	4
	D. Asas Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	5
	E. Ruang Lingkup.....	8
BAB II	:DESAIN PROGRAM PKM	
	A. Bentuk Kegiatan.....	9
	B. Perencanaan.....	10
	C. Monitoring.....	11
	D. Bentuk dan Sifat Pengabdian.....	12
BAB III	:ANALISIS KEBUTUHAN PKM	
	A. Mendefinisikan Masyarakat Marginal.....	16
	B. Metode dan Teori Analisis Kebutuhan PKM.....	22
BAB IV	:PROSEDUR PENGAJUAN PROGRAM PKM	
	A. Prosedur Pengajuan Usulan.....	26
	B. Prosedur Penilaian Usulan.....	29
	C. Jangka Waktu Pengabdian.....	29
	D. Kewajiban Pengabdian.....	29
	E. Cara Pengajuan Dana Pengabdian.....	30
BAB V	:PEDOMAN PROPOSAL PKM.....	31
BAB VI	:LAPORAN HASIL PENGABDIAN	
	A. Publikasi dan Desiminasi.....	33

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Program

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, di samping Pendidikan dan Penelitian.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe dikelola dan dikoordinasikan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) di bawah arahan Pembantu Rektor bidang akademik dan kelembagaan. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi menjadi sangat urgen. Keberadaannya menjadi sebuah keharusan dan harus mendapat dukungan dari segenap civitas akademika perguruan tinggi tersebut, dalam hal ini Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe dan masyarakat yang dilandasi oleh pemahaman yang benar tentang pengabdian kepada masyarakat.

Terminologi “Pengabdian kepada Masyarakat” yang dimaksud dalam buku pedoman ini mengacu pada istilah yang digunakan pada UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan juga PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan sebagaimana berikut:

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencedaskan kehidupan bagsa.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama sebagaimana tertuang di atas, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mereka peroleh dan miliki untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penjelasan lebih terperinci mengenai Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tertuang pada pasal 47, UU Nomor 12 tahun 2012. Dijelaskan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai macam dan bentuk kegiatan, disesuaikan dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan sarana yang diperuntukan bagi para sivitas akademika mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, serta pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Berdasarkan pada kedua landasan hukum tersebut (UU dan PMA), Pengabdian kepada Masyarakat merupakan relasi “Kemitraan Universitas-Masyarakat”. Dalam program ini sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) membangun kemitraan yang setara dengan masyarakat. Perguruan tinggi (universitas) dan masyarakat merupakan dua komponen penting yang perlu bekerja sama guna dan bersinergi membangun bangsa. Kemitraan yang terjalin di antara kedua juga merupakan upaya agar perguruan tinggi tidak tercerabut akarnya dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat merupakan sarana pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Apabila dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan terprogram dengan baik, pendekatan kemitraan ini akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi perguruan tinggi dan masyarakat. Selain itu diperlukan pula penguatan distingsi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berbasis masyarakat, hal itu tak lain karena akar dari perguruan tinggi keagamaan Islam adalah masyarakat. PTKI muncul dan tumbuh karen masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah, serta keberadaanya adalah untuk kemaslahatan masyarakat luas.

B. Tujuan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh IAIN Lhokseumawe bertujuan untuk mengembangkan, mengamalkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, agama, teknologi dan seni yang diperoleh dari hasil pembelajaran dan penelitian.

Dengan begitu kesuksesan pembangunan dan tercapainya masyarakat yang maju, adil dan sejahtera akan terwujud. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan suatu Pengabdian atau mengkaji ulang hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

Secara khusus tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan memperluas peluang bagi dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Menerapkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian/kajian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat sebagai perwujudan dari pengembangan kompetensi Sosial di kalangan para dosen.
3. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan.
4. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah dinamika masyarakat yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan, yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.
5. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses modernisasi.
6. Memberi masukan bagi pengembangan kurikulum di perguruan tinggi agar lebih relevant dengan meningkatnya kegiatan.
7. Mengoptimalkan sumber daya lembaga untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
8. Meningkatkan potensi masyarakat melalui penyadaran, pelatihan, pembinaan, pendampingan, dengan menerapkan iptek sehingga terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku untuk mencapai kesejahteraan hidup.
9. Menjalin kerjasama dengan lembaga mitra dan Wilayah mitra binaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program pengabdian kepada masyarakat.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. ASAS PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengelolaan program Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada asas:

1. Partisipasi
Melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.
2. Pemberdayaan
Memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki

masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

3. Inklusifitas

Bersedia menerima keragaman dan perbedaan serta mengakomodasinya dalam berbagai tatanan yang ada di masyarakat. Keragaman dimaksud meliputi antara lain keragaman agama, kepercayaan, budaya, adat, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, dan perbedaan kemampuan fisik/mental.

4. Kesetaraan dan keadilan gender

Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.

5. Ramah Lingkungan

Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

6. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan demokratis.

7. Transparansi

Terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta menerima masukan terkait program pengabdian kepada masyarakat.

8. Kemitraan

Menjalin kerjasama dan jejaring pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

9. Keberlanjutan

Merancang program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak manapun.

10. Kesukarelaan

Bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan masyarakat dan pihak lain.

11. Manfaat

Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka.

12. Keterkaitan ilmu, amal dan transformasi Sosial. Menjadikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan penelitian untuk mendukung transformasi sosial.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi bidang keilmuan dan keahlian yang dikembangkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan.

BAB II DESAIN PROGRAM PKM

A. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu bentuk intervensi perguruan tinggi untuk tujuan perubahan sosial. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

1. Pembelajaran masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. Pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok lain.
3. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa upaya untuk menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warga negara.
4. Pemberdayaan ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
5. Layanan masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
6. Ujicoba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (action research) ataupun teknologi

sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.

7. Kegiatan sosial yang bersifat karikatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

B. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penelitian pendahuluan atau memanfaatkan hasil penelitian yang telah ada atau muncul dari proses pembelajaran yang telah ada sehingga pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan dari tridharma perguruan tinggi dan terpadu dengan kedua dharma yang lain, yaitu penelitian dan pengajaran: Pusat Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan para pemangku kepentingan dan semua mitra menyusun desain program pengabdian kepada masyarakat. Mitra PkM pada dasarnya adalah masyarakat kampus dan luar kampus yang meliputi:
 - a. Perorangan atau individu,
 - b. Komunitas atau kelompok,
 - c. Lembaga atau organisasi, dan,
 - d. Dunia usaha atau industri

LHOKSEUMAWE

Cakupan khalayak mitra tersebut meliputi pemerintah dan swasta, masyarakat industri dan agraris, serta masyarakat perkotaan dan pedesaan, utamanya di antaranya masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat difabel, kelompok minoritas, serta kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya.

2. LP2M membentuk tim untuk melakukan analisis aset mitra pengabdian kepada masyarakat, sesuai potensi, peluang, dan kebutuhan nyata masyarakat mitra pengabdian.
3. Tim LP2M bersama masyarakat mitra pengabdian melakukan pemetaan geografis, sosial, keagamaan, ekonomi, politik, dan budaya untuk menyusun rencana tindakan berdasarkan aset, peluang dan minat.
4. LP2M bersama masyarakat mitra membuat usulan program sesuai prioritas lengkap dengan rencana program dan finansialnya (kerangka acuan) kepada Kepala LP2M.
5. Ketua LP2M membahas usulan program bersama ketua PPM, Puslit, PSG dan Kepala Biro atau Bagian Perencanaan.
6. Ketua LP2M mengusulkan program pengabdian yang telah dibahas tersebut kepada Rektor IAIN Lhokseumawe untuk diproses sesuai aturan yang berlaku, proses menjadi DIPA dan RKA-KL termasuk kegiatan yang dibiayai dari luar yang sumber dananya dari hibah, kontrak, dan kerja sama.

C. Monitoring

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara partisipatoris, responsif gender, berjenjang dan reguler, oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Sedangkan monitoring dan evaluasi di level PTKI dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pembelajaran, penelitian dan kebijakan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipantau sejak langkah awal sampai langkah terakhir. Dengan demikian, semua kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan, kesalahan atau penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih

dini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan penyempurnaan.

Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, perlu dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan evaluasi dampak.

D. Bentuk dan Sifat Pengabdian Kepada Masyarakat

Program pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh LP2M bidang PkM difokuskan pada beberapa program yang bersifat kontinyu dan bisa diaplikasikan secara langsung di tengah-tengah masyarakat pedesaan, perkotaan atau pinggiran, dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan swasta / mitra usaha.

Adapun bidang pengembangan dan wilayah kegiatan pengabdian masyarakat LP2M IAIN Lhokseumawe meliputi sebagai berikut:

1. Pengembangan bidang pendidikan Keagamaan, dimaksudkan agar dosen memiliki kepekaan terhadap persoalan keagamaan di masyarakat, pengabdian dilakukan dalam bentuk memberikan pendampingan, ceramah pendidikan keagamaan di lembaga-lembaga keagamaan masyarakat dengan target capaian yang jelas dan terstruktur. Hal tersebut dapat dilakukan baik perorangan atau kelompok, direncanakan atau tidak.
2. Pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya merupakan pemberian layanan profesional oleh perguruan tinggi kepada masyarakat yang memerlukannya. Termasuk dalam

kelompok ini adalah bantuan untuk menyusun perencanaan lembaga, perencanaan pengembangan media, perencanaan kurikulum pendidikan, rekayasa nilai (*value engineering*), maupun pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan hukum, bimbingan kerja, serta berbagai jasa konsultasi keahlian lainnya

Pengembangan sosial kemasyarakatan, dimaksudkan agar dosen dalam mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang secara Sosial maupun ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan dan didampingi, sehingga semakin menguatkan interaksi sosial yang harmonis dengan stakeholder. Program yang dikembangkan bertujuan untuk memupuk jiwa dan sikap peduli lingkungan, tenggang rasa, pengembangan usaha produktif, menumbuhkan partisipasi sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga, perlindungan terhadap hak asasi, pelayanan dan lain-lain.

3. Pemberdayaan masyarakat pinggiran berdasarkan peta wilayah binaan yang meliputi: Daerah pesisir, pengunungan hutan, DAS, perkotaan, untuk memberikan pendampingan dan menggali potensi alam yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Dengan harapan masyarakatnya lebih percaya diri. Program ini sangat dimungkinkan untuk dikembangkan dengan menjalin kerjasama dengan organisasi lokal yang berbasis daerah, seperti kelompok tani, koperasi dan karang taruna.
4. Mempercepat Pembangunan Masyarakat Miskin dan Pedesaan, dimaksudkan agar dosen meneliti, mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi lembaga kelompok masyarakat miskin di desa, daerah nelayan, dan pedalaman. Dengan berbagai inovasi pemberdayaan, dosen diharapkan mampu menerapkan berbagai hasil inovasi yang bias

mengangkat kehidupan komunitas muslim tersebut menjadi lebih baik dalam segala bidang.

5. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian tindakan action research (PAR). Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan efek domino bagi dosen dalam melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan kajian dan topik yang dikembangkan, serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan jangka panjang.

Pengembangan wilayah untuk kegiatan pengabdian mahasiswa (KPM). Hal ini, merupakan upaya mengembangkan suatu wilayah dengan seluruh isinya secara komprehensif dan terpadu. Yang nantinya dapat dijadikan sebagai media pengabdian bagi dosen dan menjadikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat dilokasi Kuliah Pengabdian Masyarakat. Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) bersifat interdisipliner, pelaksanaannya dikelola oleh Lembaga Pengabdian kepada masyarakat.

IAIN
LHOKSEUMAWE

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM PKM

Kebutuhan (*need*) adalah hajat eksistensial yang dimiliki manusia yang memerlukan pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan menuju pada titik kesempurnaan, sekaligus sebagai modal dasar bagi perjuangan kelestarian (*continuities*) hidupnya. Adapun program adalah suatu rancangan yang disusun dalam bentuk kesatuan yang organik dan lengkap (*holistic*), terkait suatu sama lainnya secara struktural dan fungsional (*systemic*), baik dalam bentuk perangkat keras (*hard ware*) maupun perangkat lunak (*software*).

Program yang baik itu jika ia ditata sejak dari idea, lalu diproses secara sistematis dalam bentuk action sosial yang konkret, sehingga dapat dinikmati hasilnya dengan baik, bahkan mempertahankannya dalam bentuk pengaturan setrategi yang lebih baik kemasa depan, agar maju terus tanpa mandek (*stagnant*), apalagi mundur ke belakang (*set back*) tanpa alasan. Jadi kebutuhan akan program bermakna bahwa suatu rancangan kegiatan yang secara eksistensi, esensi, maupun substansinya, juga kekuatan pengaruhnya (*impact*), selalu didambakan oleh subjek sasaran, baik program itu terinspirasi dari prespektif perancang (*programmer*) maupun murni (*pure*) dari kejellan penilaian kebutuhan (*need assessment*) atas kornunitas sasaran (*recivient*) dari program pengembangan (*providing programs*) sendiri.

Atas landasan itu, untuk mengadakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), sejak semula diperlukan adanya acuan konsep-konsep utama yang terkait dengan masyarakat, metode dan teori analisa kebutuhan, serta relevansinya dengan kebutuflan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat mencegah kemubaziran dalam pembangunan (*building waste*), penyimpangan, kekurangan, dan

kekacauan (*chaos*) dalam meratifikasi penyelenggaraan program pengembangan menuju perubahan (*changing*) seraya mengatasi ketertinggalan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan percepatan (*acceleration*) dalam memperoleh perbaikan kualitas hidup, kesetaraan kesempatan kerja melalui pemberdayaan (*empowering*) masyarakat di suatu desa dengan masyarakat desa lainnya yang telah lebih dahulu mapan (*survive*).

Program yang harus dilakukan oleh pengembang (*provider*) dan pengabdian (*serventer*) dengan ruang lingkup cakupannya meliputi seluruh anggota masyarakat, baik masyarakat desa yang berada di lingkungan perkotaan maupun masyarakat desa yang berada di lingkungan pedesaan itu sendiri. Namun, dalam tulisan ini hanya difokuskan pada upaya pengembangan masyarakat yang terabaikan atau terpinggirkan (*marginal societies*) dan strategi penggunaan metode dan teori analisis kebutuhan program pengabdian kepada masyarakat terabaikan tersebut. Sudah barang tentu bahwa kelak sejumlah pendekatan dan konsep, bahkan teori yang ditemukan dari kegiatan yang lebih mikro bersifat induktif ini, ada juga yang relevan dipraktekkan dalam membangun masyarakat desa di berbagai perkotaan. Hal ini terjadi manakala dapat didorong dan dimulai dengan serangkaian uji coba lapangan, sehingga hasilnya diharapkan menjadi lebih tepat atau sah (*valid*), sekaligus terpercaya (*reliable*) adanya.

A. Mendefinisikan Masyarakat Marginal

Masyarakat marginal adalah kesatuan manusia pendukung suatu kebudayaan dengan pola kehidupan yang masih tertinggal di berbagai bidang kehidupan sosial, seperti bidang ekonomi, pendidikan, budaya, hukum, dan agama. Rupa-rupanya, cita-cita mereka untuk maju pun masih jauh dari harapan, apalagi kemauan untuk berkompetisi dengan manusia lain di segala bidang

kehidupan, jelas boleh dikata mat rendah. Masyarakat marginal di samping secara intern "kurang" (untuk tidak mengatakan 'tidak pernah') memiliki kemauan untuk berkompetisi-secara ekstern pun, mereka justru tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian yang lebih memadai dari berbagai pihak dalam memberi peluang yang lebih baik bagi komunitas tersebut untuk mendapatkan akses akses sosial-ekonomi, politik, hukum, pendidikan, budaya, teknologi, agama, dan sebagainya, sebagaimana hal yang sama didambakan juga oleh masyarakat modern lainnya di seluruh tanah air.

Jika menggunakan tiga teori ekonomi dalam melihat kenyataan yang dihadapi masyarakat marginal di atas, niscaya kondisi ini bisa ditatap berdasarkan teori kemarginalan absolut, teori kemarginalan struktural, dan teori kemarginalan fungsional. Teori kemarginalan absolut mengatakan bahwa kenyataan yang didapatkan masyarakat marginal hari ini adalah tidak lebih dari apa yang acap diteorikan orang sebagai: "demikianlah garis nasib manusia yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada mereka" Karena itu, perjuangan untuk memperbaiki nasib buruk itu, sama saja dengan berjuang menentang keputusan sang Maha Pencipta.

Adapun teori kemarginalan struktural melihat bahwa apa yang didapatkan masyarakat marginal pada hari ini, tidak lain dan tidak bukan, kecuali hasil dari kebijakan politik pemerintah hari ini yang keliru dan tidak berpiliak kepada mereka orang-orang kecil itu sehingga menimbulkan ketimpangan sosial yang parah, akut, dan mengerikan, maka lahirlah apa yang disebut orang sebagai "masyarakat marginal" sebagaimana kita saksikan dewasa ini.

Sedangkan teori kemarginalan fungsional menyebutkan bahwa apa yang diperoleh masyarakat marginal hari ini tidak lain disebabkan oleh ketidakmampuan mereka melakukan kerja-kerja kemanusiaan (atau tidak menjalankan fungsinya sebagai

khalifatullah fil ardi) berdasarkan ikhtiar-ikhtiar paling tinggi yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak manusia dalam memaknai hidupnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Peran kekhalifahan yang diseralikan kepada manusia untuk memakmurkan dan memberdayakan sumber daya bumi tidak dijalankan secara optimal oleh manusia itu sendiri. Akibat logisnya adalah manusia akan menuai kerugian dan kemarginalan akibat dari tingkah polanya sendiri.

1. Masyarakat Marginal Pedalaman (Pedesaan)

Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, gonjang-ganjing mengenai peningkatan taraf hidup petani di pedesaan selalu mengalami dinamika. Apapun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup petani, seringkali menuai kritikan dan kontroversi dari berbagai pihak. Banyak kalangan yang mengatakan petani sebagai "wong cilik" yang kehidupannya semakin tertindas, marginal dan harus menjadi tumbal atas kebijakan perekonomian pemerintah.

Disisi lain, pembangunan nasional juga menciptakan kesenjangan antara desa dan kota. Hal ini sebagaimana Pengabdiansebelumnya yang sudah membuktikan bahwa pembangunan semakin memperbesar jurang antara kota dan desa. Sangat disadari, negara berkembang seperti Indonesia mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi pada sektor industri yang membutuhkan investasi yang mahal untuk mengejar pertumbuhan. Akibatnya sektor lain seperti sektor pertanian dikorbankan yang akhirnya pembangunan hanya terpusat di kotakota. Hal ini juga sesuai dengan hipotesa Kuznets, bahwa pada tahap pertumbuhan awal pertumbuhan diikuti dengan pemerataan yang buruk dan setelah masuk pada tahap pertumbuhan lanjut pemerataan semakin membaik. (Todaro, 2000) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut antara lain karena perbedaan

pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, infrastruktur investasi, dan kebijakan (Arndt, 1988).

Dewasa ini, telah banyak para ahli pembangunan masyarakat pedesaan yang mengangkat permasalahan ini ke permukaan. Karena sesungguhnya yang terjadi petani tetap miskin, sebab persoalan yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas sumber daya manusia, modal, dan kebijakan tetap sama dari tahun ke tahun walaupun bentuknya berbeda. Studi mengenai kemiskinan pedesaan oleh Sarman dan Sajogyo (2000) menunjukkan bahwa untuk daerah pedesaan di Sulteng mencapai 48,08% sementara untuk perkotaan sekitar 12,24%. Studi ini menggunakan pendekatan jism (kajian bersama) sehingga kriteria kemiskinan sangat lokalistik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kepemilikan masyarakat.

Banyak proyek/program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Proyek/program tersebut dilakukan masing-masing departemen maupun antar departemen. Pada umumnya proyekproyek yang digulirkan masih pada generasi pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Kenyataannya, ketika proyek berakhir maka keluaran proyek tersebut sudah tidak berfungsi atau bahkan hilang. beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek tersebut antara lain, yaitu: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan proyek.

Pemberdayaan dalam bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek

intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan

Secara definisi bahwa masyarakat pedalaman adalah masyarakat yang hidup rentangan interval desa ke kota terdekat sangat jauh (teresolir). Pedalaman dimaksud meliputi dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, diperbatasan antar wilayah atau negara hingga pulau-pulau terluar (pendesaan). Fenomena selama ini, banyak jalan penghubung yang sulit dilalui. Sementara, untuk transportasi juga harus memerlukan biaya mahal. Warga masyarakat pedalaman hidup dengan variasi antara lain: bercocok tanam, pertanian dengan irigasi tradisonal, ternak hewan jinak, memburu dan meramu (ekonomi subsisten).

Akses ekonomi pasar rendah. Rumah-rumah dari bahan kayu dan benda sederhana serta berjauhan satu sama lain meskipun sekarang sebagian telah agak berdekatan membentuk perkampungan. Dari segi kuantitas dan kualitas sandang, masih sangat minim. Akses transformasi rendah, tingkat pendidikan rendah, teknologi pertanian sederhana, penggunaan bahasa lebih kental dengan bahasa daerah, kearifan lokal lebih padu dari pada aturan regulasi formal dari negara, dan ironisnya kini mereka cenderung menjadi korban regulasi HPH dan rgulasi pemerintah yang merugikan mereka. Pengetahuan agama dan keberagarnaan umumnya terbatas. Mudah terbujuk rayu oleh rentenir saat terdesak. Dari segi penampilan fislk, sering kelihatan kurang gizi, terserang penyakit epidenii dan endemic berupa: busung lapar, diare, dernam berdarah, malaria, typhus, bahkan tetanus. Pada pokoknya terbatas sekali akses pelayanan sosial dasar sehingga tertutuplah hubungan mereka dengan kehidupan sosial budaya luar.

2. Masyarakat Marginal Miskin Kota

Miskin Kota adalah penduduk yang hidup di wilayah kota, perkampungan atau rumah-rumah di antara gedung-gedung atau rumah-rumah mewah, di pinggiran sungai yang mengalir di tengah kota, di kolong jembatan di pinggir atau dilahan kuburan, di samping atau di tengah kavling kosong atau mengitari tempat pembuangan sampah, di dalam lahan taman, di trotoar pertokoan, di pinggiran rel kereta api, di kios-warung pinggir jalan, dan di bawah pohon besar yang rindang. Rumah mereka terbuat dari bahan sederhana dan tambal-sulam dengan ciri kekumuhan. Ruangan dan halaman umumnya sempit, cenderung menjadi sasaran banjir dan sasaran gusuran Kamtib. Status administrasi kependudukan bervariasi: ada penduduk tetap, migrasi musiman "sirkuler" dan ada pula yang liar. Mata pencaharian umumnya serabutan di sektor informal. Menurut Hans Dieter Evers menyebutnya sebagai "massa apung," yakni orang-orang yang bekerja sebagai penjaja jualan pikul atau gendong atau gerobak, pengemudi bajay atau becak, pengoiek motor atau sepeda, penjual makanan warung dan atau rokok, pekeria jasa buruh, tukang ngamen, penjaja jasa kenikmatan seks, pemulung, penjaga malam/keamanan (Kamtib), pemungut, dan pembuang sampah, pembantu rumah tangga berupa cuci gosok masak-belanja atau baby sitters. Perilaku sanitasi: mandi, buang air dan cuci pakaian ke sungai atau selokan atau bantuan/patungan untuk membeli air pompa.

Kondisi seperti ini akhirnya menimbulkan akibat lanjutnya sering menderita prevalensi penyakit epidetni dan endemic berupa diare, TBC, demam berdarah, diare, typhus, tetanus dan flu burung. Pengobatan biasanya memilih pengobatan sendiri atau obat tradisional atau obat medis modern bebas beli di warung. dan jika sudah agak berat baru dibawake puskesmas dan jarang yang menggunakan jasa dokter paraktik di rumah sakit. Para politisi terkadang menggunakan kehidupan mereka sebagai isu politik

tatanan negara yang rapuh untuk mendapatkan simpati berbagai pihak saat-saat pemilu. Walaupun dalam kenyataan, tatkala partai politiknya menang, tetap saja kehidupan masyarakat miskin kota ini disepelekan. Tekadang jga sering di manfaatkan oleh pihak yang mengatasnamakan lembaga swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendapatkan dana dari sponsor tertentu dari dalam atau luar negeri, tetapi programnya tidak serius menangani kemiskinan kota tersebut, bahkan program Bappeda dari masing-masing daerah masing-masing kabupaten/kota banyak yang tidak menyentuh mereka atau tidak memasukkannya ke dalam proyek pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Tetapi, tidak aneh jika setelah turlin persetujuan anggaran dari DPRD atau pihak berwenang lainnya, dana tersebut dialihkan ke program lainnya yang lebih menjanjikan keuntungan di pihak pengembang. Dengan demikian, petugas Lembaga Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Islam harus menjadikan ini sebagai sebuah contoh yang 'tidak baik' untuk diikuti, sehingga mereka berusaha untuk mencari solusi terbaik. dalam pelaksanaan program pemberdayaan, pengabdian, atau pengembangan masyarakat (*community developmentprogi-ams*), sebagaimana menjadi salah satil tujuan tridarma perguruan tinggi.

B. Metode dan Teori Analisis Kebutuhan PKM

Metode adalah cara atau jalan untuk menentukan teknik serta pilihan prosedur dalam mengritisi, mengategorisasi serta menentukan prioritas dan komponen yang paling mendesak diantara kebutuhan program pengabdian kepada masyarakat yang amat diperlukan untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat yang menjadi sasaran (implementasi) program pengabdian tersebut. Untuk itulah kiranya diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Memahami Kebutuhan Masyarakat

Kebutuhan masyarakat adalah komponen-komponen yang menjadi penguatan ketahanan hidup masyarakat, yaitu kebudayaannya secara utuh. Kebudayaan yang dimaksud adalah ide yang berisi system pengetahuan, yang menjadi dasar atau acuan bagi seseorang sebagai anggota masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sosial, melahirkan materi kebudayaan dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, organisasi sosial serta kesenian. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dari ke tujuh unsur akan bisa berbeda tergantung pada siapa yang akan dipercayakan melakukan analisis. Jika salah memahami, menganalisa, dan menafsirkan kebutuhan tersebut, maka besar peluangnya untuk gagal dalam implementasi pembangunan.

2. Memahami Kebutuhan Masyarakat dari Perspektif "Insan Pengabdian"

Insan pengabdian, baik bersifat personal maupun tim atau kelompok yang mandiri, atau personal maupun tim dari satu lembaga berupa pranata atau institusi, membuat suatu pedoman utopis tentang kehidupan suatu masyarakat yang seyogyanya dibudayakan, baik tentang agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa, dan komunikasi, sebagaimana diutarakan di atas. Atau dengan menggunakan konsep lainnya tentang unsur kehidupan, Misalnya, mulai dari tingkat ide sampai terwujud dalam realitas sosial berupa aksi-aksi nyata dan dapat menghasilkan materi kebudayaan sebagai kekayaan yang diharapkan dapat mengubah masyarakat dari kehidupan yang kurang sejahtera menuju kepada kehidupan yang lebih sejahtera.

Ini berarti, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sasaran yang hendaknya jangan hanya diacu dari tolok ukur talenta dan kecakapan pengabdian, tanpa melihat latar belakang sosial, kebudayaan, serta kemauan masyarakat sasaran. Karena itu, pendekatan ini terkadang dinyatakan juga sebagai metode

pembangunan yang datang dari atas (*top down methods*). Model pendekatan seperti ini, acap pula dinamakan dengan pendekatan “memaksa” karena prinsip pendekatan ini menghedakai adanya:

- a) Tercpainya target program
- b) Time schedule yang tepat
- c) Priode pertanggung jawaban keuangannya mudah
- d) Dapat mengerjakan program lainnya
- e) Kepuasan hanya dirasakan pengembang dan pengabdi

Kelamahan metode ini adalah masyarakat hanya dijadikan objek, tidak berperan dalam membangun dirinya sehingga rasa kepemilikan, rasa ingin terlibat, rasa bertanggung jawaba menjadi rendah. Masarakat lebih pasif dan hanya mdapat menikmati hasil.

Dengan demikian, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan memahami cara-cara melakukan kegiatan yang di mulai dari penyusunan rancangan pengabdian kepada masyarakat, setrategi pendekatan yang dilakukan pada masyarakat dab pelaksanaan kegiatan dilapangan termasuk monitoring, dan evaluasi, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan menghindari adanya gangguan yang negatif.

3. Memahami kebutuhan Masyarakat dari prespektif warga masyarakat

Dengan metode ini, pengabdi (*provider*) memandang bahwa, masyarakat lebih tahu, paham, atau profesional, tentang potensi masalah yang mereka rasakan, serta proses yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya.

Mereka yang mengerti pengembangan yang akan mengatasi ketertinggalan mereka dalam memenuhi kebutuhan minimalnya, dan menyejajarkannya dengan kemajuan masyarakat tetangga lainnya pada berbagai lini. Dari situla para pengabdi dapat menyimpan dalam-dalam segala kecerdasan dan

keterampilan tentang sistem kehidupan suatu masyarakat yang mereka idamkan.

Para peneliti atau pengabidi harus mampu membeikan rangsangan kepada masyarakat untuk berfikir bagaimana cara untuk maju dan sejajar dengan masyarakat lainnya yang memeiliki pandangan lebih baik. Para pengabdipun harus memiliki keberanian untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menata masa depannya sendiri, kecuali terkait dengan bimbingan mengenai metode, teknik, prosedur serta pendekatan yang akan digunakan.



BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN PROGRAM PKM

A. Prosedur Pengajuan Usulan

Usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan ke Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat di LP2M IAIN Lhokseumawe harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

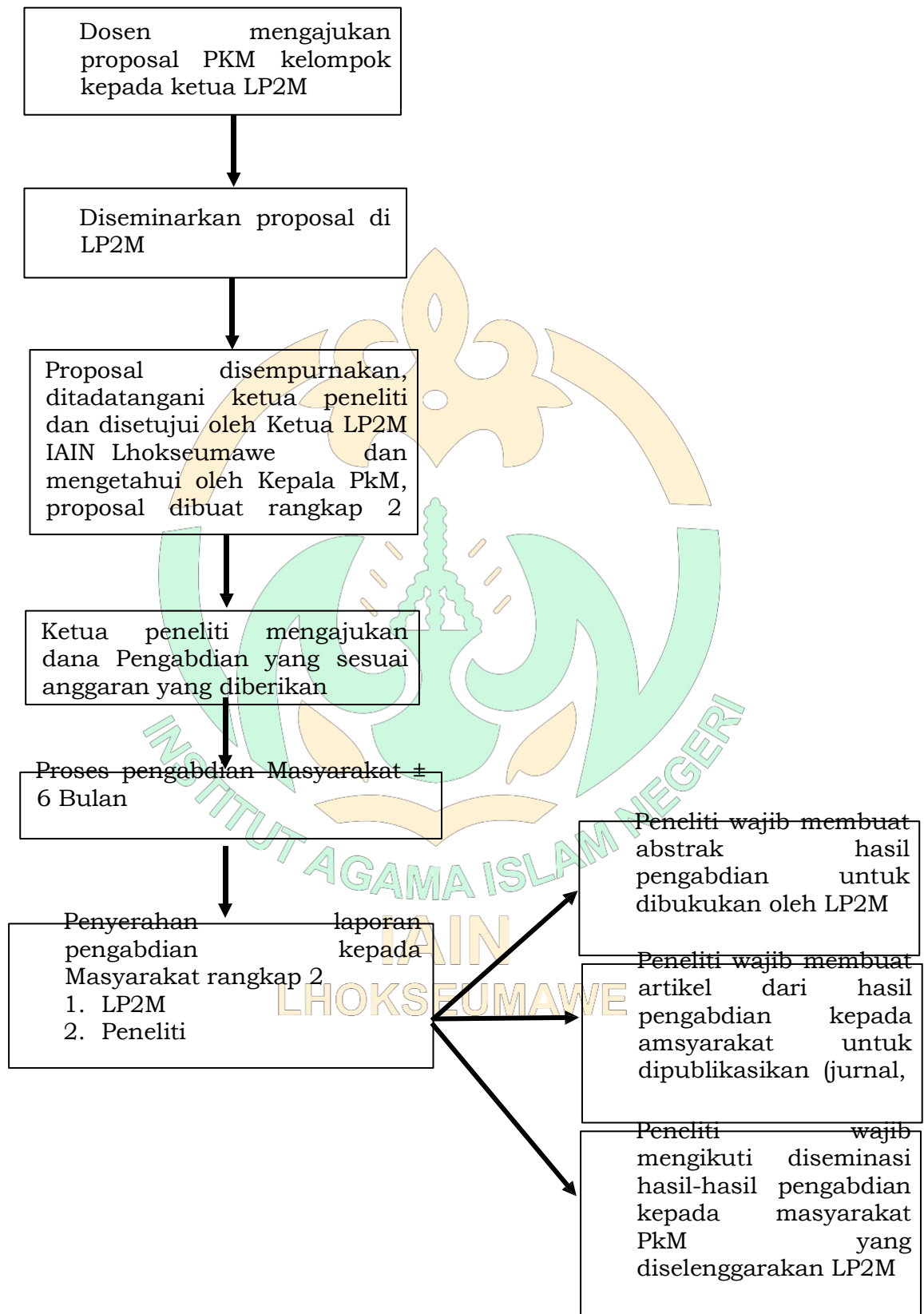
1. Pengusul adalah dosen tetap PNS dan Non PNS di lingkungan IAIN Lhokseumawe.
2. Pengusul terdiri dari 1 ketua, dan 2 anggota, untuk ketua minimal berpangkat lektor
3. Usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan diajukan untuk dibiayai DIPA IAIN Lhokseumawe
Setiap usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mendapat persetujuan/legalitas dari Dekan Fakultas dan juga harus mendapat persetujuan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat diajukan dalam rangkap 4 (empat), dengan menggunakan ukuran kuarto dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan warna sampul hijau muda.

Terkaitan prosedur pengajuan usulan sebenarnya sangat tergantung dari mana sumber pendanaan program pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Secara garis besar berdasarkan sumber dananya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi 2 kelompok. Pendanaan berasal dari IAIN Lhokseumawe dan pendanaan dari lembaga di luar institusi IAIN Lhokseumawe. Prosedur pengajuan masing-masing berbeda, berikut rinciannya:

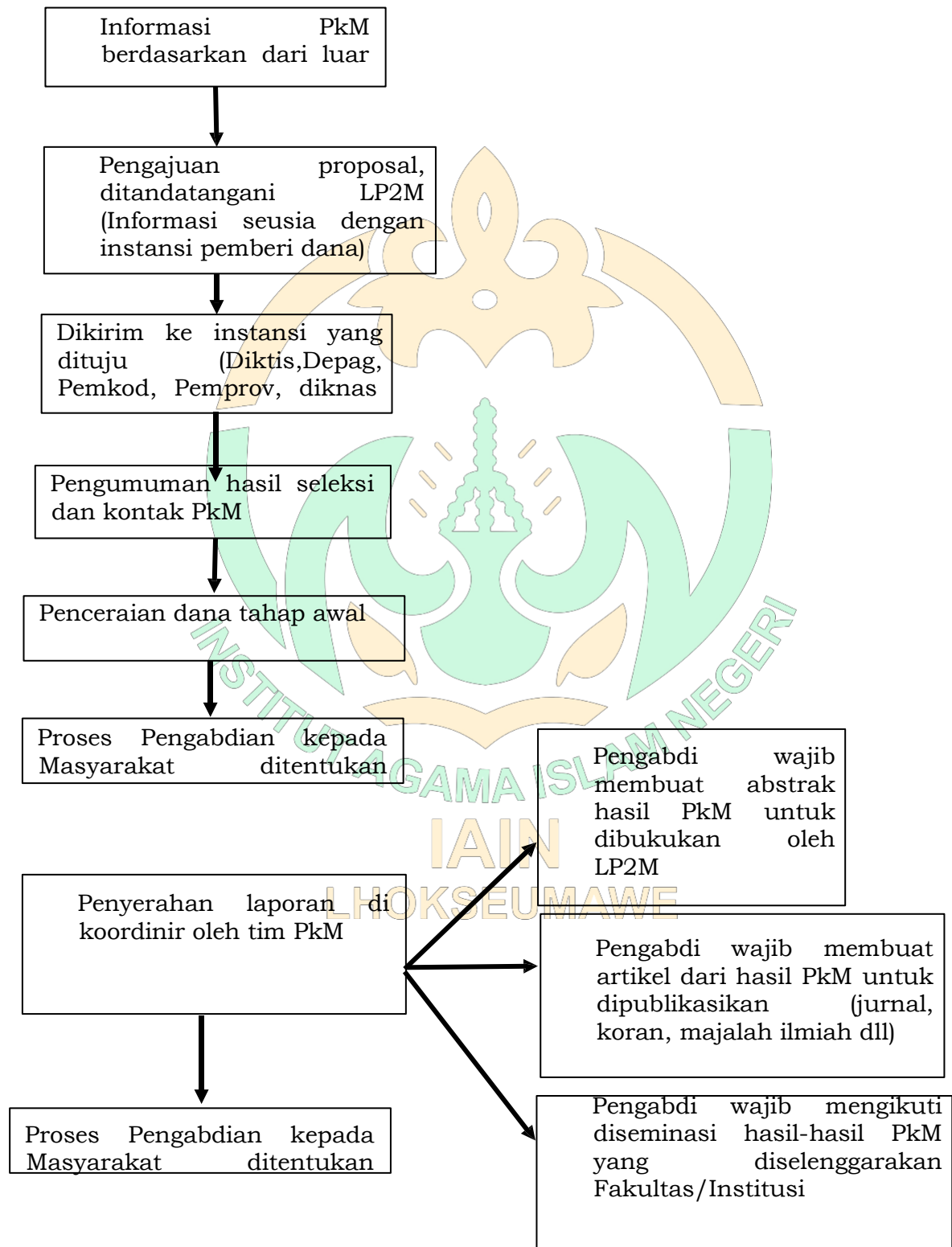
1. Prosedur Pengabdian dengan pendanaan dari IAIN Lhokseumawe

Pendanaan yang bersumber dari DIPA IAIN merupakan pendanaan yang dapat diusulkan oleh LP2M dan diteruskan kepada

dosen untuk mengajukan dana Pengabdian melalui penyusunan proposal. Adapun prosedurnya dapat dilihat pada gambar 1.1



2. Prosedur Pengajuan PkM dengan Pendanaan dari Luar IAIN Lhokseumawe. Adapun prosedurnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dan disesuaikan dengan format informasi Pengabdiantang diselenggarakan oleh pemberi dana dari instansi tertentu.

B. Prosedur Penilaian Usulan

Semua usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat LP2M IAIN Lhokseumawe akan dinilai oleh tim evaluasi (*reviewer*) yang dibentuk oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. Sebelum tim evaluasi (*reviewer*) dibentuk maka usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dinilai oleh Ka. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. Penilaian didasarkan kepada beberapa kriteria yang telah ditentukan dan diungkapkan dari butir-butir yang terdapat pada format usul kegiatan. Setiap kriteria masing-masing mempunyai bobot tertentu dan untuk suatu usul kegiatan akan diberikan skor tertentu.

C. Jangka Waktu Pengabdian

Jangka waktu pengabdian di lingkungan IAIN Lhokseumawe dalam satu periode Pengabdian waktunya dibatasi maksimal 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut peneliti harus menyelesaikan kegiatan pengabdiannya.

D. Kewajiban Pengabdi

Setelah jangka waktu Pengabdian selesai, peneliti wajib memberikan laporan hasil PkM dibuat rangkap 2 (untuk PKM dan Peneliti). Di samping itu peneliti juga wajib mempublikasikan hasil Pengabdian dalam jurnal, majalah ilmiah, koran, proceeding dll yang tersedia di lingkungan IAIN Lhokseumawe maupun di luar, sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, baik bagi peneliti, lembaga maupun masyarakat luas.

E. Cara Pengajuan Dana pengabdian

Pengabdian setelah mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat, berhak untuk mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kemampuan dana IAIN Lhokseumawe. Adapun proposal pengabdian yang akan didanai merupakan proposal yang sudah diseminarkan di LP2M, disetujui oleh Kepala PkM dan mengetahui Ketua LP2M.



BAB V PEDOMAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Berikut ini format proposal Pengabdian kepada masyarakat standar yang sebaiknya diikuti, terutama untuk pendanaan dari IAIN Lhokseumawe. Adapun untuk pendanaan dari luar IAIN Lhokseumawe model menyesuaikan pedoman dari pemberi dana.

A. Judul Pengabdian

Judul Pengabdian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai Pengabdian yang diusulkan. (lihat lampiran 1)

B. Pendahuluan/ Latar Belakang

Pengabdian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti, mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan atau menerapkan suatu model. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan Pengabdian yang disertai dengan data pendukung sebagai kelanjutan Pengabdian sebelumnya.

C. Gambaran Umum Situasi

Gambaran ini memuat tentang situasi dimana kegiatan dilakukan, di samping itu juga akan dibahas gambaran kondisi lingkungan masyarakat sekitar untuk memungkinkan dilaksanakannya kegiatan PkM yang selanjutnya dilakukan pengabdian.

D. Tujuan

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan pengabdian. Pengabdian dapat bertujuan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, menganalisis, mengevaluasi, membuktikan atau

menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan atau membuat suatu model atau prototipe.

E. Kerangka Pemecahan

F. Sasaran Program

Sasaran meliputi masyarakat, pemerintah dan

G. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan, bisa dengan menggunakan model pendampingan, Pelaksanaan atau pengembangan yang menyangkut masalah dalam Pengabdian yang akan dilaksanakan. Uraikan metode yang digunakan dalam Pengabdian secara rinci.

H. Rancangan Evaluasi

I. Jadwal Pengabdian

Buatlah jadwal kegiatan pengabdian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan Pengabdian dalam bentuk bar-chart. Bar-chart memberikan rincian kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan tersebut.

J. Personalia Pengabdian

Ketua Peneliti

1. Nama Lengkap dan Gelar

2. Golongan Pangkat dan NIP/NIK

3. Jabatan Fungsional

4. Fakultas/Program Studi

5. Bidang Keahlian

6. Waktu untuk Pengabdianini (jam/minggu)

Anggota Peneliti (Maks. 3 orang)

Pekerja Lapangan

Tenaga Administrasi

K. Estimasi Dana Kegiatan

BAB VI LAPORAN HASIL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PUBLIKASI DAN DISEMINASI

Pemerintah lewat UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada ayat 3 menegaskan bahwa hasil dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) wajib diterbitkan dalam berbagai bentuk publikasi, yaitu:

1. Jurnal Ilmiah, diterbitkan minimal setiap semester sekali terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Buku, diterbitkan minimal setiap semester sekali, memuat tulisan dosen mengenai Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Tulisan di media massa, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mendorong seluruh sivitas akademika untuk menuliskan gagasan mereka mengenai pengabdian kepada masyarakat di media massa agar dapat dibaca publik;
4. Majalah, diterbitkan minimal setiap semester satu kali, memuat berbagai macam tema di bidang pengabdian kepada masyarakat;
5. News letter, diterbitkan setiap bulan sekali, sebagai media komunikasi antara sivitas akademika dan para pemangku kepentingan di bidang pengabdian kepada masyarakat; atau
6. Media lainnya, baik elektronik maupun cetak, diterbitkan sesuai kebutuhan, minimal melakukan up-date data elektronik satu bulan satu kali.

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan tersebut, selanjutnya dapat menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan dasar pengambilan keputusan/kebijakan.

Selain menerbitkan dalam bentuk publikasi ilmiah sebagaimana dipaparkan di atas, sivitas akademika yang melakukan pengabdian kepada masyarakat juga berkewajiban

membuat laporan program pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini sistematika laporan pengabdian kepada masyarakat:

1) Halaman Sampul Depan

Halaman Sampul depan memuat: Logo IAIN Lhokseumawe, Tulisan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat, Judul Pengabdian kepada Masyarakat, Nama pengabdi, lembaga dan Institut Agama Islam, Bulan dan Tahun, dengan cover sesuai warna. Contoh Sampul Depan Laporan Pengabdian (lihat lampiran

2) Halaman Judul

Halaman judul memuat: Judul, Lambang IAIN Lhokseumawe, nama pengabdi, lembaga, tulisan IAIN Lhokseumawe dan waktu pengajuan Contoh Halaman Judul laporan Pengabdian (lihat lampiran)

3) Halaman Pengesahan

Halaman ini memuat Judul, identitas peneliti, jumlah tim peneliti, lokasi pengabdian, pembiayaan pengabdian, jangka waktu pengabdian, biaya yang diperlukan, tanda tangan ketua tim, Kepala PkM dan Ketua LP2M. (lihat lampiran 2)

4) Kata Pengantar

Kata pengantar berisi ucapan terima kasih dari tim pengabdian karena dapat menyelesaikan Pengabdian dengan baik, di samping itu juga memuat tujuan mengapa dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada alinea akhir di uraikan manfaat Pengabdian dan kritik atau saran yang dapat disampaikan oleh pembaca.

5) Daftar Isi

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas menyeluruh tentang isi hasil Pengabdian dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau anak sub judul. Di dalam daftar isi tertera urutan judul, sub judul, dan anak sub judul disertai dengan nomer halamannya.

6) Daftar Tabel

Jika dalam Pengabdian terdapat banyak tabel, perlu adanya daftar tabel yang memuat urutan judul tabel beserta dengan nomor halamannya.

7) Daftar Gambar

Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomer halamannya. Perlu tidaknya suatu daftar gambar tersendiri, sama persyaratannya dengan daftar tabel.

8) Daftar Lampiran

Daftar lampiran dibuat bila hasil Pengabdian dilengkapi dengan lampiran yang banyak dan isinya adalah urutan judul lampiran dan nomer halamannya.

9) BAB I: Pendahuluan

Bab ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari materi proposal pengabdian kepada masyarakat, pengabdian dapat memberikan tambahan teori atau temuan-temuan yang relevan untuk penyempurnaan pengabdian kepada masyarakat, Pada bagian ini meliputi: 1. Latar belakang, 2. terutama menyangkut latar belakang kegiatan pengabdian.

10) BAB II: Gambaran Umum Wilayah Pengabdian

Dalam gambaran ini akan diuraikan, berbagai potensi dan SDA yang ada, serta menyampaikan kondisi wilayah secara riil untuk dilakukan kegiatan dan pasca kegiatan.

11) BAB III: Metode Strategi Pengabdian

Metode Pengabdianmenuntun setiap tahapan kegiatan, apabila dalam pelaksanaan Pengabdian terjadi berbagai perubahan atau cara yang tepat dilakukan untuk melakukan perbaikan dan perubahan wilayah atau masyarakat.

12) BAB IV: Hasil dan Pengabdian

Dalam bab ini mengungkap semua hasil Pengabdian yang telah dilakukan pengabdian. Hasil Pengabdian dapat dilakukan dengan pendekatan empiris dan langsung. Hasil Pengabdian

bersifat uraian dan fakta-fakta yang di peroleh dalam kegiatan tersebut.

13) BAB V: Kesimpulan dan Saran

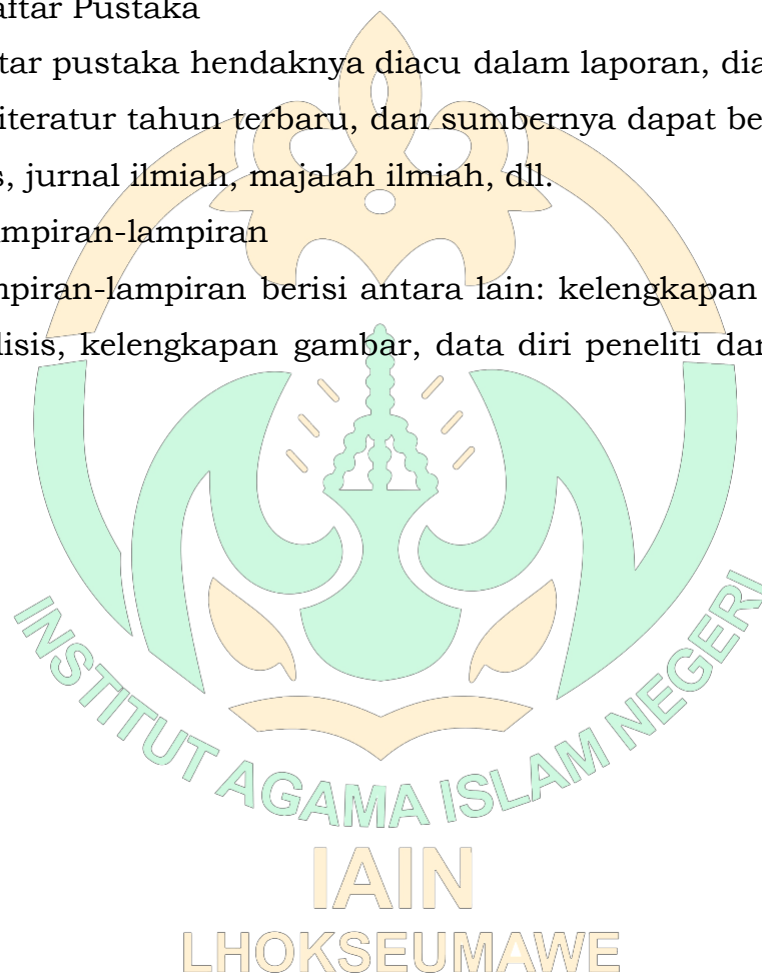
Kesimpulan bersifat menyimpulkan Pengabdian yang telah diperoleh, dan menjawab tujuan yang ditetapkan. Saran hendaknya yang bersifat implikatif, baik untuk pengembangan ilmu/teori maupun untuk kebijakan.

14) Daftar Pustaka

Daftar pustaka hendaknya diacu dalam laporan, diambil dari literatur-literatur tahun terbaru, dan sumbernya dapat berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, dll.

15) Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran berisi antara lain: kelengkapan data dan hasil analisis, kelengkapan gambar, data diri peneliti dan anggota peneliti



Lampiran 1

Contoh Halaman Judul Proposal pengabdian kepada masyarakat

Proposal Pengabdian

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS
SEKOLAH (PTK/PTS) BAGI KEPALA SEKOLAH MADRASAH
IBTIDAIYAH KABUPATEN ACEH UTARA**



Oleh:

Dr. Zulfikar Ali Buto, MA

**IAIN
LHOKSEUMAWE**

**JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN LHOKSEUMAWE**

2017

Lampiran 2

Lampiran 2 Contoh Halaman Pengesahan Proposal pengabdian kepada masyarakat

Halaman Pengesahan

1. a. Judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Kategori : (Agama, Pendidikan, Hukum, sosial dan polbud)
- c. Kategori : Mandiri atau Kelompok
2. Ketua tim pengabdian
 - a. Nama Lengkap dan Gelar :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Pangkat/Gol dan NIP/NIK :
 - d. Jabatan Fungsional :
 - e. Fakultas / Jurusan :
3. Jumlah Anggota Peneliti : Orang
 - a. Nama Anggota Peneliti I :
 - b. Nama Anggota Peneliti II :
4. Lokasi Pengabdian :
5. Kerjasama dengan Institusi Lain
 - a. Nama Institusi :
 - b. Alamat :
 - c. Telepon/fax/e-Mail :
6. Lama Pengabdian :

7. Biaya Yang Diperlukan : Rp

(.....)

Lhokseumawe ,..... 2017

Mengetahui:
Ketua Peneliti

Katua Jurusan

Cap dan Tanda Tangan
(.....)

Tanda Tangan
(.....)

